

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang dingin memberikan dampak baru terhadap perubahan tatanan struktur internasional. Struktur internasional tidak dapat dipahami lagi sebagai tatanan yang *state centric*. Selama perang dingin, struktur internasional ditandai dengan adanya rivalitas antara negara *super power* dalam mengatur tatanan bipolar dunia. Runtuhnya Uni Soviet serta runtuhnya tembok Berlin membawakan dinamika baru dalam konstelasi politik internasional. Runtuhnya Uni Soviet turut mengubah sistem internasional yang bipolar menjadi unimultiporal. Hal ini dikarenakan adanya kemenangan Amerika Serikat sebagai negara *super power* dalam perang dingin, sementara disisi lain muncul polar-polar baru.

Paradigma lain yang juga turut berkembang adalah paradigma liberal yang berasumsi bahwa negara dapat bekerjasama dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi. Paradigma ini percaya bahwa negara non-aktor juga mempunyai peranan yang penting dalam mengupayakan transparansi dan perjanjian kooperatif.

Isu yang turut berkembang adalah mengenai keamanan negara (*traditional security*) yang mulai bergeser kepada isu keamanan non-tradisional. Salah satunya adalah mengenai isu lingkungan hidup yang selama perang dingin berlangsung kurang mendapatkan perhatian oleh negara. Selama perang dingin, negara-negara terbagi ke dalam blok-blok ideologis. Prioritas negara tertuju kepada apakah

berpihak pada ideologi liberal atau ideologi komunis. Selain itu, terdapat negara-negara yang memilih untuk netral. Selama perang dingin, negara-negara terbagi ke dalam blok-blok ideologis. Prioritas negara tertuju kepada apakah berpihak pada ideologi liberal atau ideologi komunis. Selain itu, terdapat negara-negara yang memilih untuk netral. Netralitas ini justru secara tidak langsung melahirkan blok tersendiri yang dinamakan Gerakan Non Blok (GNB) yang mana mayoritas anggotanya berasal dari negara Asia dan Afrika.

Dalam dinamika studi Ilmu Hubungan Internasional, terdapat berbagai isu kontemporer yang pada awalnya lebih bersifat kepada hal yang teknis, yang kemudian berkembang menjadi agenda politis yang berhubungan pada lahirnya pola-pola baru dalam kerjasama internasional. Dimana dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional terkini tidak lagi hanya memperhatikan aspek hubungan antar-negara saja yang hanya mencakup aspek politik, ekonomi, budaya serta aspek-aspek klasik lainnya, tetapi juga aspek lain seperti hubungan rezim internasional, keamanan transnasional, organisasi internasional, ekonomi, hak asasi manusia, dan juga masalah lingkungan hidup.

Pemanasan global, degradasi lingkungan hidup, kelangkaan flora-fauna dan perubahan iklim pada awalnya merupakan contoh-contoh permasalahan yang terkait dengan lingkungan hidup. Perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang negara sentris dan berorientasi pada isu *high politic* semasa perang dingin membuat isu yang terkait dengan lingkungan hidup terabaikan. Selain itu, perkembangan ekonomi yang masif, pertumbuhan penggunaan teknologi baru, dan peningkatan jumlah populasi mengakibatkan peningkatan penggunaan energi

dan sumber daya alam. Dinamika ini kemudian mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup. Dampak pencemaran lingkungan hidup tidak hanya bersifat lokal, namun juga mempunyai dampak global seperti adanya *global warming*.

Merespon akan hal ini, komunitas internasional sadar bahwa permasalahan lingkungan hidup bukanlah suatu permasalahan lokal semata, tetapi haruslah diselesaikan secara bersama. Substansi isu lingkungan hidup sebagai objek kajian keilmuan sangat luas cakupannya. Kerusakan dan kebakaran hutan, keanekaragaman hayati, polusi udara akibat emisi karbon dari industri maupun kendaraan bermotor, pencemaran sungai dan laut, kerusakan pantai, pembuangan limbah nuklir merupakan cakupan isu lingkungan hidup yang memengaruhi kelangsungan hidup umat manusia sebagai individu maupun kelompok.

Dari banyaknya substansi lingkungan hidup diatas saat ini, sumber daya air menjadi sumber kehidupan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kelangsungan makhluk hidup selama ini, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna bagi kehidupan makhluk hidup, salah satunya adalah manusia. Sangat jelas bahwa seluruh manusia membutuhkan air bersih, khususnya air bersih untuk keperluan sehari-hari. Sumber daya air di Indonesia menghadapi permasalahan dan tantangan yang meningkat setiap tahunnya, salah satunya adalah masalah banjir. Penyebab banjir secara umum adalah akibat tingginya intensitas curah hujan, namun Daya Dukung Lingkungan (DDL) juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur yang tidak menghiraukan aspek tata ruang menyebabkan terlampauinya daya

dukung lingkungan, yang diakibatkan oleh aktivitas yang tidak ramah lingkungan seperti penambangan tambang ilegal, bergantinya fungsi lahan dibantaran sungai, berkurangnya pohon dan daerah resapan air. Contohnya seperti banjir yang seringkali terjadi di ibukota Indonesia, Jakarta.

Berdasarkan catatan sejarah banjir kota yang dulu disebut Batavia ini sudah beberapa kali dilanda banjir. Diantaranya pada tahun 1621, 1654, 1873, dan tahun 1918 pada masa pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada periode tahun 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, dan 2013 (<http://sejarahri.com/sejarah-banjir-di-jakarta>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017). Banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 1918 terjadi karena hujan turun selama 22 hari sejak Januari sampai Februari. Pada 4 Februari 1918, *Weltevreden* (kini disekitar lapangan banteng) tergenang air. Begitu pula permukiman Tanah Tinggi, Kampung Lima, Kemayoran Belakang, Glodok, dan daerah-daerah lain juga ikut tergenang air yang mencapai 1,5 meter di beberapa tempat. Banjir bahkan sampai ke Jakarta bagian barat karena bendungan sungai grogol jebol karena tidak sanggup menampung intensitas air hujan.

Akibatnya ribuan warga harus mengungsi. Rumah-rumah di Pasar Baru, Gereja Katedral, dan *Molenvliet* (lapangan monas) dijadikan lokasi pengungsian (<http://news.liputan6.com/sejarah-banjir-terbesar-jakarta>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017). Banjir yang terjadi pada tahun 2013 juga terjadi karena hujan yang mengguyur wilayah Jakarta secara merata mencapai intensitas 40-100 mm, mengakibatkan volume air meningkat. Besarnya volume air mungkin bisa ditampung bila faktor-faktor lain seperti situ yang berfungsi baik, sistem drainase,

dan tata kota yang mendukung. Tetapi kenyataannya belum demikian. Tata kota yang parah, situ tak berfungsi baik, dan juga sistem drainase yang buruk mengakibatkan volume air meluap, sampai menjebol tanggul. Cakupan banjir cukup luas, bahkan kawasan bundaran Hotel Indonesia dan Menteng pun terendam banjir (<http://sains.kompas.com/bencana-alam-paling-parah-tahun-2013>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017). Hingga 21 Januari 2013 tercatat sebanyak 20 orang meninggal dunia setelah banjir melanda sejak 15 Januari 2013.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Dr. Sutopo Purwo Nugroho mencatat dari jumlah korban tewas itu sebagian besar justru meninggal dilokasi yang jauh dari sungai-sungai yang meluap. Beberapa korban terserum listrik karena berada dirumah atau ditempat yang terendam oleh banjir (<http://news.liputan6.com/sejarah-banjir-terbesar-jakarta>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017). Bahkan hingga saat ini ketika memasuki musim hujan, banjir selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta.

Manajer Penanganan Bencana Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Mukri Fiatna mengatakan ada tiga indikator yang menunjukkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Jakarta. Pertama, 13 sungai yang ada di Jakarta telah terdegradasi berupa penyempitan badan sungai dan pendangkalan. Kedua, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat kecil yaitu pada kisaran 9,8% dari total luas DKI Jakarta. Ketiga, terdapat situ dan hutan bakau yang telah berubah fungsi. Menurut Mukri, penyempitan badan sungai dan pendangkalan salah satunya disebabkan oleh banyaknya tumpukan sampah. Ketika sungai sudah mengalami sedimentasi dan

tersumbat oleh sampah maka daya alir sungai melambat. Sungai yang telah tersendimentasi tidak lagi mampu menampung asal air dari hulu dan dari daratan.

Akibat ketidakmampuan ini, maka air meluap. Ditambah lagi air dari daratan tak lagi mampu diserap tanah terbuka karena banyaknya permukaan tanah yang tertutup bangunan dan gedung. Air itu harusnya tertampung di situ, tapi sudah banyak situ yang kini beralih fungsi. Sementara itu, pada wilayah hilir yang terdapat di pesisir pantai Jakarta Utara dan Barat, banjir terjadi karena permukaan tanah yang sudah turun, ditambah lagi dengan terhambatnya laju air sungai oleh masuknya air laut. Masuknya air laut ke sungai ini akibat sabuk hijau (hutan *mangrove*) telah habis.

Wahana Lingkungan Hidup pun menyarankan, khususnya pada pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi resiko bencana non- struktural berupa pengendalian tata kelola ruang dan menambah semaksimal mungkin luas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana ketentuan UU No.26/2006 tentang Tata Ruang. Pemerintah sebaiknya melakukan mitigasi struktural berupa normalisasi dan revitalisasi sungai untuk dikembalikan sesuai fungsinya (<http://www.antaraneews.com/berita/walhi-banjir-dki-karena-turunnya-daya-dukung-lingkungan> diakses pada tanggal 13 April 2017).

Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap Situ dan Hutan *Mangrove*. Sedangkan untuk mengurangi tingkat risiko bencana terkait timbulnya korban jiwa dan kerugian dalam jumlah besar, maka tindakan yang patut ditempuh adalah memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu memiliki pengetahuan terhadap bencana alam. Dengan demikian, maka diharapkan masyarakat siap siaga dalam

menghadapi ancaman dan risiko bencana dan memiliki kesadaran untuk menjaga, melindungi dan memulihkan secara kolektif lingkungan yang telah terdegradasi agar kembali mampu memberikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya (<http://www.antaraneews.com/berita/walhi-banjir-dki-karena-turunnya-daya-dukung-lingkungan>, diakses pada tanggal 13 April 2017).

Banyak usaha dalam pengelolaan sumber daya air yang diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan meminimalkan dampak lingkungan dari penggunaan air tersebut. Keberhasilan pengelolaan sumber daya air memerlukan pengetahuan yang akurat tentang sumber daya yang tersedia. Langkah-langkah dan proses untuk mengevaluasi secara signifikan dan nilai kebutuhan air serta memperhatikan struktur lingkungan dan tanah (<http://news.detik.com/terobosan-pencegahan-banjir-dan-pengelolaan-air-yang-benar>, diakses pada tanggal 17 April 2017).

Dalam kasus banjir di ibukota Jakarta, ada beberapa faktor yang membuat air sering membanjiri wilayah di Jakarta. Antara lain buruknya penanganan sampah dan pengelolaan drainase, tersumbatnya sumber saluran air, rusaknya bendungan, serta erosi tanah yang menyisakan batuan hingga tidak ada resapan air. Pembangunan permukiman, dimana tanah kosong diubah menjadi jalan/tempat parkir, menyebabkan daya serap terhadap air hujan tidak ada. Selain itu, banyak permukiman yang dibangun di bantaran sungai, sehingga menyebabkan menyempitnya aliran sungai, yang imbasnya bisa terjadi pendangkalan sungai. Pendangkalan bisa terjadi karena sedimentasi akibat fenomena alam, maupun ulah

manusia yang membuang sampah sembarangan, apalagi langsung ke sungai (<http://www.wwf.or.id/jakarta-dan-ancaman-banjir>, diakses pada 17 April 2017).

Disisi lain, proyek-proyek bangunan yang pendiriannya tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis seperti pembangunan pusat belanja, perkantoran, apartemen, maupun perumahan, juga diduga kuat menjadi pemicu banjir. Pada tahun 2010 luas ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Provinsi DKI hanya 9,6% dari 65 ribu hektare luas wilayah Jakarta. Padahal bila merujuk pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau disyaratkan sedikitnya ada 30% (<http://www.wwf.or.id/jakarta-dan-ancaman-banjir>, diakses pada 17 April 2017).

Pada prinsipnya, pemecahan masalah banjir dilakukan secara fisik dan non-fisik bersama-sama dalam jangka panjang untuk menyeimbangkan siklus air. Pendekatan pembangunan fisik melalui teknologi buatan manusia selama ini adalah pembuatan waduk buatan (situ, danau, embung air) dan sumur resapan. Pembuatan waduk dan sejenisnya memerlukan lahan yang sekarang sulit didapatkan di kota-kota besar khususnya Jakarta. Demikian juga penerapan sumur resapan juga sulit dilaksanakan secara massal. Sementara, pendekatan non-fisik melalui perencanaan tata ruang dan tata kelola air yang baik, selaras dengan kegiatan manusia.

Tata ruang air tidak berarti menata ruang airnya, akan tetapi lebih kepada penataan ruang yang memberikan perhatian lebih kepada siklus air agar keseimbangan air terjaga. Pada musim hujan air tidak menimbulkan masalah besar didaratan dan sebaliknya pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan atau ke-

kurangan air (<https://pu.go.id/view/konsep-pemerintah/departemen-pu/>, diakses pada tanggal 17 April 2017).

Upaya pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya dilaksanakan semata-mata melalui pembangunan infrastruktur seperti saluran, waduk dan kanal, tetapi juga melalui pendekatan perubahan perilaku penduduk yang tinggal di Jakarta. Banjir di Jakarta tidak pernah dapat dipisahkan dari faktor manusia yang hidup di wilayah ini. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua pendekatan dalam pengendalian banjir, yakni pendekatan struktural dan non-struktural.

Sejak tahun 2007, pendekatan struktural Pemerintah DKI Jakarta difokuskan pada enam aspek, yaitu pembangunan banjir kanal, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran, dan pembangunan pompa, pintu air, dan saringan sampah. Kedepannya, target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengurangi banjir di DKI Jakarta sebanyak 40% pada tahun 2011 dan sebanyak 75% sampai tahun 2016. Pengurangan banjir 40% di DKI Jakarta pada tahun 2011 antara lain akan dicapai melalui program pengerukan 13 sungai dan 56 saluran serta Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat. Sedangkan target 35% untuk tahun 2016 diharapkan akan tercapai melalui program pembangunan saluran terowongan penghubung Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, rehabilitasi waduk dan Situ yang ada serta pembangunan Waduk Pluit (http://bpbd.jakarta.go.id/assets/attachment/study/buku_mjb.pdf, diakses pada tanggal 17 April 2017).

Banjir bukan hanya menjadi masalah di Indonesia saja, namun juga beberapa negara di luar negeri termasuk negara maju. Salah satu negara maju yang juga memiliki masalah dengan banjir adalah Belanda.

Bila melihat dari segi topografisnya, maka negara yang pernah menjajah Indonesia ini memiliki struktur daerah yang sama dengan ibukota Jakarta yaitu daratannya yang lebih rendah daripada permukaan laut. 60% daratan Belanda merupakan kawasan yang lebih rendah daripada permukaan laut sehingga dulunya banyak warga Belanda yang meninggal dunia dan kehilangan rumahnya akibat banjir. Selain itu, sebagian wilayah Belanda yang sangat datar akan memperlambat aliran air ke laut. Kondisi tak menguntungkan ini dapat mengancam Belanda ketika musim penghujan tiba. Ini terbukti ketika banjir besar yang terus menghantam Belanda. Sehingga pada 1920, dimulailah pembangunan bendungan yang dinamakan *Afsluitdijk*.

Sistem polder pun juga digunakan Pemerintah Belanda untuk menghadang banjir serta mengontrol ketinggian air. Polder merupakan sebidang tanah yang rendah dikelilingi oleh tanggul yang membentuk semacam kesatuan buatan. Ini berarti tidak ada kontak dengan air dari daerah luar selain yang dialirkan melalui perangkat manual ke tempat tersebut. Air buangan seperti air hujan dikumpulkan ke area Polder ini dan dipompa ke sungai atau kanal yang langsung bermuara ke laut. Polder merupakan sistem tata air tertutup dengan meliputi berbagai elemen seperti tanggul, pompa, saluran air, kolam retensi, pengaturan lahan dan instalasi air kotor terpisah. Terdapat beberapa tipe Polder jika didasarkan pada asalnya dan bentuknya. Ada Polder yang merupakan dataran rendah yang dikelilingi oleh

tanggul dan searah sungai. Selain itu ada Polder hasil reklamasi sebuah daerah rawa, air payau dan tanah basah. Ada juga Polder akibat pembendungan pada muara sungai (<https://tirto.id/belajar-banjir-ke-negeri-belanda-bKNT>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017).

Sistem ini sudah dikembangkan Belanda pada abad ke-11, dengan adanya *dewan* yang bertugas menjaga ketinggian air dan menanggulangi banjir (*waterschappen*). Sistem ini disempurnakan pada abad ke-13 dengan menggunakan kincir angin untuk memompa air keluar dari daerah yang berada di bawah permukaan air laut.

Berdasarkan laporan Pemerintah Belanda yang berjudul *Water Management in the Netherlands*, pemerintah Belanda juga membangun tanggul-tanggul raksasa (*Dijken*) bagi daerah-daerah yang tidak memiliki Polder, agar terhindar dari gelombang pasang-surut laut. *Dijken* juga melindungi daerah rendah yang menjadi muara dari dua sungai besar Eropa yakni sungai *Rijn* dan sungai *Maas*. Tanggul ini terdapat di pinggir pantai provinsi *Zeeland*, *Noord Holland*, *Friesland* dan *Groningen*. Kini Belanda tidak lagi mengalami banjir dan membuktikan jika bencana alam seperti banjir dapat dihindari dengan adanya sistem polder tersebut (<https://tirto.id/belajar-banjir-ke-negeri-belanda-bKNT>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017).

Melihat kemampuan dari negara Belanda dalam mengatasi banjir dan terkenal dengan sistem pengairan terbaik inilah yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam membangun kerjasama Indonesia-Belanda dibidang tata kelola/ pengelolaan sumber daya air dan penanggulangan banjir, khususnya di daerah Jakarta.

Pada saat kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda Frans Timmermans ke Jakarta tahun 2013 menyatakan bahwa pemerintah Belanda berkomitmen meningkatkan kerja sama berbagai bidang dengan Indonesia, terutama dalam sistem tata kelola perairan (*water management*). Belanda siap melakukan konsultasi dan mengirimkan para ahlinya ke Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam mengatasi banjir, pengelolaan air bersih dan air minum, serta kebutuhan air untuk pertanian. Belanda siap menjadi mitra bagi Indonesia dalam pembahasan di tingkat internasional seputar permasalahan pengelolaan air ini. Timmermans mengatakan pengelolaan air merupakan salah satu hal penting yang harus dikuasai Indonesia terlebih dalam posisi rawan banjir saat ini terutama di Jakarta.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan kerjasama dalam urusan pengelolaan air ini sifatnya bukan bantuan maupun investasi, namun lebih pada optimalisasi fungsi dan kemampuan dalam kerangka kerjasama kemitraan yang sejajar. Belanda memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola air, baik untuk menanggulangi ancaman banjir, juga air untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dengan Menteri Luar Negeri Belanda Frans Timmermans membahas adanya peluang, terutama tata kota pada tingkat antar kota untuk bisa bekerjasama dalam mengelola air. Menurut Marty perspektifnya adalah kemitraan, bukan bantuan hibah apalagi pinjaman, tapi lebih pada pembangunan kapasitas program-program kerjasama yang saling menunjukkan kemitraan yang sejajar. Pada intinya Indonesia ingin belajar mengenai tata kelola sistem perairan kepada Belanda yang dikenal sebagai ahlinya. Menurut Marty pihak Belanda sudah melakukan

peninjauan ke beberapa tempat, diantaranya ke Pluit, Jakarta Utara (<http://www.voaindonesia.com/ri-belanda-jalin-kerja-sama-bidang-tata-kelola-air.html>, diakses pada tanggal 13 April 2017).

Tujuan utama dari kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda dibidang tata kelola/pengelolaan sumber daya air adalah untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama di bidang air secara terpadu, menjaga ketersediaan air, perlindungan terhadap banjir dan pengelolaan sumber daya air terpadu (termasuk air tanah). Selain itu juga penyediaan air untuk makanan dan ekosistem, penyediaan air dan sanitasi (termasuk kontribusi terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan milenium), air dan iklim (<http://bwssum1.net/index.php/berita/datin-sda/kerjasama-indonesia-belanda-bidang-air-dan-lingkungan>, diakses pada 13 April 2017).

Kerjasama bilateral Indonesia-Belanda dibidang air telah dimulai sejak tahun 2001 berlandaskan dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh empat Kementerian, yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum mewakili Indonesia serta *Ministry of Transport, Public Works and Water Management* dan *Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands* mewakili Belanda. Kerjasama yang dikenal dengan 4P-MOU ini dilaksanakan dalam dua periode yaitu periode 2001-2006 dan 2007-2011 (<http://bwssum1.net/index.php/berita/datin-sda/kerjasama-indonesia-belanda-bidang-air-dan-lingkungan>, diakses pada 13 April 2017).

Kerjasama tersebut dilanjutkan untuk periode 2012-2015 dalam lingkup yang sama, secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinasi serta mengikutsertakan beberapa instansi terkait baik dari pihak Indonesia, yakni Kementerian Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun dari pihak Belanda yakni Kementerian Perekonomian, Pertanian dan Inovasi; Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan; dan Kota Rotterdam (http://www.pu.go.id/main/view_pdf, diakses pada tanggal 13 April 2017).

Pada periode 2015-2019 terdapat beberapa kegiatan yang dikoordinasikan melalui kelompok kerja, antara lain menyangkut pengelolaan sumber daya air terintegrasi, air untuk pangan dan ekosistem, serta ketersediaan air dan sanitasi. Nota kesepahaman periode IV sendiri telah ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dengan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda pada 14 April 2015, serta oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI pada 8 Mei 2015.

Salah satu kegiatan prioritas yang dibahas dalam pertemuan adalah *National Capital Integrated Coastal Management* (NCICD) yang ditujukan untuk perlindungan wilayah pesisir Jakarta, sanitasi dan suplai air, peningkatan konektivitas, komunitas perkotaan berkelanjutan dan pengembangan kawasan (<http://beritadaerah.co.id/kerjasama-indonesia-dengan-belanda-di-bidang-sumber-daya-air-terus-berlanjut/>, diakses pada tanggal 13 April 2017).

Menteri Basuki didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja serta jajaran pejabat eselon I Kementerian PUPR

menjelaskan perkembangan terakhir terkait NCICD, bahwa melalui rapat kabinet pada April 2016 diputuskan agar proyek ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. NCICD bukan hanya proyek penanggulangan banjir, melainkan pemulihan lingkungan hidup secara keseluruhan. Sebagai konsekuensinya, cakupan proyek NCICD menjadi lebih luas dengan mengintegrasikan daerah hulu, hilir, dan pesisir. Akan ada intansi yang akan dibentuk dibawah Kementerian PUPR untuk menangani proyek ini secara khusus mulai tahun 2017.

Sementara Menteri Van Haegen menyatakan langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam pengelolaan pesisir harus mempertimbangkan kenaikan muka air laut yang telah menjadi isu global. Karena itu langkah jangka pendek perlu dibarengi dengan penyusunan rencana aksi jangka panjang yang adaptif. Ia juga menyinggung pentingnya pelibatan publik dalam kegiatan pembangunan(<http://beritadaerah.co.id/kerjasama-indonesia-dengan-belanda-di-bidang-sumber-daya-air-terus-berlanjut/>, diakses pada tanggal 13 April 2017).

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji penelitian kerjasama Indonesia-Belanda di Bidang Tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup ini, peneliti melihat beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novritrianti Paramita, jurusan ilmu hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Pasundan, Bandung dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Kerjasama Antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan *World Meteorological Organization* (WMO) Kaitannya Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Indonesia, tahun 2017”. Dalam karya tulis ini membahas

mengenai isu lingkungan hidup dan isu ini menjadi salah satu masalah yang vital dari kajian kerjasama kontemporer dalam hubungan bilateral sebuah negara, yang didasarkan pada kepentingan bersama oleh masing-masing pihak/pun negara dalam mengatasi serta menanggulangi persoalan lingkungan hidup yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan global yang mana efek buruknya akan dirasakan dan merugikan semua pihak atau negara. PBB menyadari bahwa risiko bencana yang disebabkan oleh isu lingkungan hidup ini tidak main-main dan akhirnya melatarbelakangi terbentuknya sebuah organisasi internasional dibawah naungan PBB yang khusus memberikan pelayanan meteorologi, hidrologi dan geofisika yang bernama *World Meteorological Organization* (WMO) pada tahun 1950.

Pada tahun 1950, Indonesia yang diwakili oleh BMKG resmi bergabung dalam keanggotaan WMO, yang ditetapkan oleh UU RI No.6 tahun 1994 dalam Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Keanggotaan Indonesia di WMO tidak sebatas dalam hal pertukaran data dan informasi, tetapi meliputi pengurangan risiko bencana di Indonesia yang salah satunya adalah bencana banjir yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia, terutama pada musim hujan. Dengan semakin bertambahnya bencana banjir dari tahun ke tahun, akhirnya melatarbelakangi pembentukan pengurangan risiko bencana banjir di Indonesia yang salah satu upayanya dengan membentuk sistem peringatan dini oleh BMKG dan WMO.

Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sharaswaty Karyono, jurusan ilmu hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau, Pekanbaru dalam sebuah Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Vol.1 No.3 tahun 2016 dengan judul “Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Belanda Dalam Bidang Pertahanan Tahun 2013-2014”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Indonesia dan Belanda telah mengawali kerjasama pertahanannya pada tahun 1952, yakni persetujuan kerjasama pinjam dan pakai kapal penyapu ranjau antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Kerjasama antara Indonesia dan Belanda berlanjut pada bidang militer, yakni pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Secara resmi pada tanggal 4 Februari 2014, Indonesia dan Belanda menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang kerjasama pertahanan. Indonesia memilih Belanda sebagai partner dalam kerjasama pertahanan tentunya mempunyai alasan. Indonesia membutuhkan kerjasama pertahanan dengan Belanda untuk menjaga kedaulatan negaranya dari ancaman, baik ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional.

Indonesia juga membutuhkan Belanda sebagai partner dalam pengembangan teknologi dan industri pertahanan di dalam negeri. Indonesia membangun hubungan bilateral dengan Belanda, terutama pada bidang pertahanan tentunya mempunyai pertimbangan tersendiri agar tercapainya kepentingan nasional Negara Indonesia. Pencapaian kepentingan nasional didasarkan atas pengamatan akan nilai-nilai strategi, dimana sistem kerjasama yang ditawarkan ke

Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi nyata yang dibutuhkan Indonesia sendiri.

Adapun penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Angelina Aritonang, jurusan ilmu hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau, Pekanbaru dalam sebuah Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Vol.4 No.2 tahun 2017 dengan judul “Upaya *Indonesian Diaspora Network* (IDN) dalam Diplomasi Publik Indonesia terhadap Belanda di Bidang Sosial Budaya Tahun 2013-2016”. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pembentukan *Indonesian Diaspora Network* di Belanda yang mana pada Kongres Diaspora Indonesia I yang diselenggarakan di Los Angeles terdapat 2 catatan penting; 1. Berhasil menyulut suatu identitas dan kebanggaan baru sebagai “diaspora indonesia”, 2. Lahirnya “*Declaration of Indonesian Diaspora*” yang merupakan visi mengenai diaspora dan mengenai masa depan Indonesia. Dan Kongres Diaspora Indonesia I ini merupakan cikal bakal dari lahirnya IDN yang merupakan hasil dari pemikiran KBRI di Amerika Serikat, yang melihat peluang sangat besar dari penyebaran penduduk Indonesia terutama dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat menjadi dasar penyelenggara Kongres Diaspora Indonesia di Belanda.

Pada Kongres Diaspora II yang diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan *Indonesian Diaspora Network* sebagai tindak lanjut dari Kongres Diaspora I menghasilkan 3 rekomendasi; 1. Membentuk jaringan Indonesia Diaspora Global yang mewakili seluruh afiliasi, 2. Mendirikan kantor kepentingan diaspora yang berbadan hukum di Jakarta, 3.

Melaksanakan Kongres Diaspora Indonesia setiap 2 tahun serta mendorong setiap afiliasi (*chapters*) untuk melakukan pertemuan antar-sesi (*international meeting*). Berdasarkan 3 rekomendasi diatas pada tahun 2013 terbentuklah jaringan diaspora di berbagai negara termasuk Belanda yang dinamakan sebagai *Indonesian Diaspora Network Chapter Netherland* (IDN-NL) yang terintegrasi dengan *Indonesian Diaspora Network* Global atau Jejaring Diaspora Global Indonesia.

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan banjir, isu lingkungan hidup, transfer ilmu pengetahuan, dan kepentingan kerjasama dengan negara Belanda. Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana Indonesia khususnya kota Jakarta dalam menanggulangi masalah banjir dengan bantuan dari Belanda. Berdasarkan uraian tersebut menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: ***“Kerjasama Indonesia-Belanda di Bidang Tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2017 (Studi Kasus Penanggulangan Banjir Di Kota Jakarta)”***.

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah:

1. Hukum Internasional

Pemahaman mengenai prinsip dan kaidah perilaku dimana negara-negara terkait menaati setiap peraturan diranah hukum internasional yang berlaku.

2. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Memberikan pemahaman bagaimana persamaan sejarah, kondisi strategis, karakteristik, kerjasama, dan isu yang dihadapi oleh negara kawasan asia tenggara.

3. Hubungan Internasional di Eropa

Merupakan landasan dalam mempelajari karakteristik negara Belanda.

4. *Environmental Issues*

Kajian mata kuliah ini membahas mengenai bagaimana isu lingkungan hidup sekarang bisa menjadi isu yang mendapat perhatian dari para aktor-aktor negara maupun nonnegara dalam hubungan internasional. Salah satunya kerjasama Indonesia dan Belanda terkait tata kelola air dan lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor:

Bagaimana Kerjasama Indonesia-Belanda di Bidang Tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Banjir di Kota Jakarta Tahun 2012-2017?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor:

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk penanggulangan banjir di Jakarta dalam kerangka kerjasama Indonesia-Belanda dibidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Indonesia-Belanda dalam bidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017 terkait penanggulangan banjir di kota Jakarta?
3. Apa saja hasil yang diperoleh dari kerjasama Indonesia-Belanda dibidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017 terkait penanggulangan banjir di kota Jakarta?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dan luasnya pembahasan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda, maka peneliti membatasi masalah penelitian agar lebih fokus dan lebih terarah. Karena hubungan kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam bidang tata kelola air sudah terjalin sejak lama yaitu dari tahun 2001 sampai 2019, maka dari itu peneliti ingin lebih fokus dari tahun 2012-2015. Peneliti memilih batas waktu penelitian dari tahun 2012-2015 karena pada periode ini dalam *Memorandum of Understanding "The Cooperation in the Field of Water Management"* ada kesepakatan dalam bidang pengelolaan air, yang mana berkaitan dengan judul peneliti yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Ditambahkan sampai tahun 2017 karena agar cakupannya lebih luas dan ada program-program yang terlaksana di tahun 2017 ini. Dan kenapa memilih Jakarta sebagai studi kasusnya, karena melihat bahwa Jakarta adalah Ibukota negara Indonesia yang pusat pemerintahan semuanya berpusat di Ibukota Jakarta. Dan ibukota adalah cerminan baik atau buruknya wilayah-wilayah suatu negara itu. Apabila ibukota disuatu negara tidak tertata dan dikelola dengan baik, maka negara lain yang melihat akan beranggapan

wilayah-wilayah di negara tersebut juga tidak tertata dan dikelola dengan baik oleh negaranya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dari penulisan karya tulis ini adalah peneliti berharap bisa menjawab rasa keingintahuan peneliti, juga agar masyarakat umum mengetahui kerjasama dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda dalam mengembangkan tata kelola air, khususnya di daerah Jakarta.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk penanggulangan banjir di Jakarta dalam kerangka kerjasama Indonesia-Belanda dibidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Indonesia-Belanda dalam bidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017 terkait penanggulangan banjir di kota Jakarta.
3. Untuk mengetahui apa saja hasil yang diperoleh dari kerjasama Indonesia-Belanda dibidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017 terkait penanggulangan banjir di kota Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, dan dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu pengetahuan untuk studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai Kerjasama Indonesia-Belanda di Bidang Tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2017 (Studi Kasus Penanggulangan Banjir Di Kota Jakarta).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan bagi peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional, serta para pembaca penelitian ini.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umum, serta dapat memberikan solusi bagi pemerintah agar bisa menyelesaikan masalah banjir, tidak hanya di daerah Jakarta tetapi juga di daerah-daerah di Indonesia yang rentan terkena banjir, sehingga Indonesia bisa terbebas dari masalah banjir dimasa yang akan datang.

